

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan institusi pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tanggung jawab dan peran strategis di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana melalui pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (BKKBN, 2019: 29). Hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa perlunya pembangunan nasional dalam membangun manusia Indonesia secara utuh mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (UU NO. 52 Tahun 2009).

Berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, Presiden RI pun memberi mandat kepada BKKBN untuk berkontribusi dalam mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), yaitu Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Agenda Prioritas ke-5 “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”, Prioritas ke-8 “Melakukan revolusi karakter bangsa” (BPPN, 2014:5-5). BKKBN kemudian diamanahi untuk merancang suatu program kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target pembangunan nasional terutamanya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019 dengan mengintegrasikan fokus penggarapan pada dimensi pembangunan kesehatan, pembangunan Indonesia dari pinggiran serta pengembangan karakter penduduk Indonesia (BKKBN, 2021: 41).

BKKBN sendiri telah mengeluarkan program Keluarga Berencana (KB) sebelumnya, namun program tersebut dirasa lambat laun melemah dari berbagai sudut persoalan. Program KB nyatanya tidak cukup berhasil mengatasi

permasalahan kependudukan yang muncul hampir di setiap daerah di Indonesia pada era tahun 2000-an. Seperti tingkat kelahiran penduduk yang masih tinggi, laju pertumbuhan dan jumlah kuantitas penduduk yang terus meningkat, serta rendahnya pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas (BKKBN, 2020). Dalam hasil proyeksi penduduk Indonesia 2005-2025, *Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia masih tergolong tinggi yaitu berada pada angka 2,5 pada tahun 2015. Artinya kondisi Indonesia pada saat itu belum mencapai tahap *replacement level fertility* sehingga upaya penurunan tingkat kelahiran masih diperlukan agar tidak berdampak pada laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk di Indonesia yang terbilang masih cukup tinggi juga (BAPPENAS, 2008: 16).

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000-2010 atau SP2010, menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia pada saat itu mencapai 237.641,3 juta jiwa dengan laju pertumbuhan hingga 1,49 persen (Badan Pusat Statistik (BPS), 2010: 3.1). Terdapat peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada hasil Sensus Penduduk 1990-2000 atau SP2000 yaitu 206.64,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,45 persen. Perbedaan tersebut kemudian memproyeksikan jumlah kuantitas penduduk di Indonesia mencapai 261.890,9 juta jiwa pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2002: 2). Jumlah penduduk yang besar menjadi permasalahan kependudukan dikarenakan belum diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Dari hasil data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015, IPM Indonesia sebesar 0,689 dan tergolong dalam tingkat menengah. Namun hal ini masih mengindikasikan bahwa kualitas SDM di Indonesia juga perlu diupayakan kembali agar terus meningkat (Badan Pusat Statistik (BPS), 2016: 2). Apabila kuantitas penduduk yang semakin besar tidak diiringi kualitas SDM didalamnya, maka akan jadi penghambat dalam pembangunan nasional.

BKKBN pun kemudian membentuk dan mencanangkan program Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk investasi dari Program KB yang secara langsung dapat bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia diseluruh tingkatan wilayahnya (BKKBN, 2021: 41). Rancangan pada program ini tidak hanya befokus pada upaya untuk mengendalikan jumlah

penduduk saja, melainkan dibentuk sebagai model miniatur pembangunan dalam pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh (BKKBN, 2007: 4). BKKBN juga mengubah nomenklatur yang awalnya bernama Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam membumikan, mengangkat kembali, kemudian merevitalisasi program dari BKKBN guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat sebagai upaya dalam mengaktualisasikan dan menerapkan fungsi-fungsi keluarga secara utuh. Dengan demikian, jika ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Kampung KB sebelumnya berpusat pada kegiatan-kegiatan yang ada pada pengelolaan KKBPK saja, Kampung KB saat ini berubah menjadi program pembangunan yang lebih terpadu dan terintegrasi karena melibatkan seluruh lintas sektor lainnya (BKKBN, 2022:3).

Program Kampung KB dicanangkan untuk pertama kalinya pada tahun 2016 dan persebaran program tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2017 ke seluruh wilayah di Indonesia (Marolli, 2017). Program Kampung KB dikelola serta dilaksanakan oleh petugas dari perangkat daerah yaitu Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD). Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah yang menaungi program tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Pada tahun 2016, Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang angka usia nikah pertama masyarakatnya masih rendah, yaitu pada kisaran 18,75. Sedangkan angka Total Fertility Rate (TFR) terbilang cukup tinggi yaitu 2,6. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat karena terhambatnya pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk secara kuantitas maupun kualitas (Oche, 2016).

Sehingga pemerintah pada saat itu melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengaktifkan dan mengembangkan kembali program Kampung KB yang merupakan salah satu program unggulan dari BKKBN Pusat. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan salah satu misi pokok Kabupaten Bandung Barat yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dalam pendidikan, kesehatan,

ekonomi maupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun kesejahteraan keluarga melalui peningkatan sumber daya manusia agar lebih berkualitas. DP2KBP3A sangat mendukung pencanangan Program Kampung KB karena program tersebut dianggap sebagai miniatur dari program pembangunan kependudukan di KBB yang dapat memberikan pembinaan Peserta KB, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 8 (delapan) Fungsi Keluarga, menumbuhkan kembali sifat gotong-royong dalam bermasyarakat, memberikan peluang lintas sektor dalam memberikan pelayanan keluarga dan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan menurunkan angka stunting (KBB, 2022: 12).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di DP2KBP3A, Kabupaten Bandung Barat memiliki 165 Kampung KB yang tersebar di 165 Desa dan 16 Kecamatan. Kampung KB yang tersebar ditujukan untuk wilayah atau lokasi yang memiliki kriteria utama yaitu Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I tinggi atau diatas rata-rata dan jumlah peserta KB yang masih rendah, termasuk wilayah yang terbelakang, terpinggirkan atau yang sulit dilihat oleh pemerintah seperti wilayah dengan kriteria kumuh, kawasan miskin, terpencil dan berada di perbatasan, memiliki tingkat kependudukan yang tinggi, Daerah Aliran Sungai (DAS), berada di kawasan industri, wisata, dan pesisir, juga wilayah yang berada di bantaran kereta api (BKKBN, 2007: 18).

Dari keseluruhan Kampung KB yang telah dicanangkan di Kabupaten Bandung Barat tersebut juga telah terklasifikasi kedalam empat strata yang berbeda berdasarkan hasil data yang tercatat dalam website resmi Kampung KB, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Klasifikasi Kampung KB di Kabupaten Bandung Barat**

<b>Jenis Klasifikasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen (%)</b>
Dasar	148	89,7
Berkembang	8	4,85
Mandiri	2	1,21
Berkelanjutan	7	4,24
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>100</b>

Sumber: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>

Data tersebut menunjukkan bahwa program Kampung KB Kabupaten Bandung Barat tidak berjalan secara optimal dalam implementasinya. Tujuan yang ingin dicapai oleh program ini pun tidak dapat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat. Terlihat dari banyaknya Kampung KB yang masih berada pada tingkat dasar, yang mana pelaksanaannya belum tepat sasaran, pengelolaan programnya belum efektif, dan masih jauh dari capaian program (BKKBN, 2022). Menurut Pak Dikdik selaku Sub Koordinator Advokasi dan Pembinaan Kesertaan KB Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut utamanya diakibatkan oleh partisipasi warga dan peran pemerintah di tiap desa yang kurang aktif dan sinkron dalam pelaksanaan dan pengelolaan program Kampung KB di wilayahnya (BKKBN, 2022).

Partisipasi warga dalam program Kampung KB nyatanya merupakan elemen atau modal penting dalam mengoptimalkan keberhasilan program tersebut karena baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program Kampung KB ini semuanya melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam buku paduan Kampung KB bahwa salah satu prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB yaitu adanya partisipasi aktif masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan Kampung KB. Termasuk dalam strategi pengelolaan program Kampung KB, terdapat dua poin penting yang perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan Program Kampung KB untuk mencapai keberhasilan program Kampung KB yaitu yang pertama, peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam membantu dan membina serta memberikan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Dan kedua, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat (BKKBN, 2007: 17).

Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan dengan institusi masyarakat pada pengelolaan kampung KB akan berpengaruh terhadap kemajuan dan keberhasilan Kampung KB disuatu daerah. Keberhasilan suatu Kampung KB tergantung pada bagaimana masyarakat dan pihak terkait dapat memenuhi keseluruhan indikator yang dibutuhkan untuk keberhasilan. Indikator keberhasilan Kampung KB sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu indikator input yang meliputi persiapan yang dibutuhkan dalam pembentukan Kampung KB, indikator proses

yang meliputi pelaksanaan kegiatan Kampung KB, dan indikator output yang meliputi manfaat dan hasil dari pelaksanaan Kampung KB tersebut. Sedangkan untuk mengetahui capaian yang sudah ditempuh oleh Kampung KB, dapat dilihat dari klasifikasi Kampung KB yang terbagi kedalam empat bagian yaitu klasifikasi dasar, berkembang, mandiri, dan berkelanjutan (paripurna) (BKKBN, 2018: 11). Kampung KB yang berada pada klasifikasi dasar merupakan Kampung KB yang belum memenuhi indikator-indikator yang ada, sebaliknya Kampung KB yang berada pada klasifikasi paripurna merupakan Kampung KB yang seluruh indikatornya telah di capai.

Salah satu Kampung KB yang sudah mencapai tahap paripurna berada di RW 006 Kampung Pamecelan, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang. Bertempat di RW 06 Kampung Pamecelan dengan nama Kampung KB yaitu Insan Sejahtera Ramah Anak telah diresmikan pada tanggal 7 Juli 2017 (BKKBN, 2016: 4). Berdasarkan data Desa Sukajaya tahun 2015, terpilihnya RW 06 Kampung Pamecelan sebagai Kampung KB karena telah memenuhi kriteria tertentu. RW 06 merupakan wilayah padat penduduk dengan jumlah 1357 jiwa didalamnya dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, dilihat dari Keluarga Prasejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yang lebih tinggi dari rata-rata desa. Dalam data PK 2015 tercatat bahwa 140 Kartu keluarga (KK) masuk kedalam kategori Pra KS dan 140 KK lainnya masuk kedalam kategori KS 1 dengan pemberdayaan warga yang sangat minim (*Kampung KB Insan Sejahtera Ramah Anak*, 2017).

Meskipun begitu, nyatanya Kampung KB Insan Sejahtera telah berhasil menjadi salah satu Kampung KB yang masuk kedalam kategori berkelanjutan (paripurna) dan menjadi satu-satunya Kampung KB percontohan di Kabupaten Bandung Barat. Artinya pengelolaan Kampung KB Insan Sejahtera ini telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian programnya. Kampung KB Insan Sejahtera juga telah berhasil memenuhi keseluruhan indikator yang diperlukan. Dalam hasil observasi awal, peneliti melihat bahwa salah satu faktor yang mendukung Kampung KB Insan Sejahtera berhasil mencapai tingkat paripurna yaitu karen adanya sinkronisasi



antara pemerintah dengan warga setempat yang ikut aktif dalam mengelola dan melaksanakan program Kampung KB tersebut.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi warga RW 006 Kp Pamecelan Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Bandung Barat dalam program Kampung KB ini hingga dapat menyokong keberhasilan Kampung KB Insan Sejahtera sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana seharusnya program Kampung KB ini berjalan dan sesuai dengan capaian yang ingin dituju, penelitian ini juga dapat menjadi contoh atau referensi bagi Kampung KB lainnya dalam mengembangkan program Kampung KB melalui partisipasi aktif masyarakatnya agar dapat mencapai tingkat berkelanjutan sebagaimana Kampung KB Insan Sejahtera Ramah Anak..

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi warga dalam mekanisme pengelolaan program Kampung KB Insan Sejahtera di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana keberhasilan yang dicapai program Kampung KB Insan Sejahtera dalam upayanya meningkatkan kualitas keluarga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi warga dalam mekanisme pengelolaan program Kampung KB Insan Sejahtera di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai program Kampung KB Insan Sejahtera dalam upayanya meningkatkan kualitas keluarga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai terutamanya pada pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berbuah positif baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan mendalam bagi pembaca mengenai partisipasi warga dalam program Kampung KB. Penelitian ini juga secara khusus diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih bagi pengetahuan khususnya ilmu dibidang sosiologi yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu mengenai partisipasi warga dalam program Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi sejumlah pihak sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat mengenai Desa Sukajaya yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam program Kampung KB sebagai salah satu upayanya dalam meningkatkan keluarga berkualitas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi lembaga terkait khususnya DP2KBP3A dalam pengembangan Program Kampung KB di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tema sentralnya berkaitan dengan Partisipasi Warga dalam Program Kampung Kampung Berkualitas (KB).



## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang begitu rendah sebagai hasil dari permasalahan kependudukan yang begitu kompleks dan tidak seimbang baik dari segi kuantitas maupun kualitas penduduknya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun secara penuh mendukung Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) untuk dicanangkan guna mengatasi permasalahan kependudukan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas institusi keluarga. Dengan konsep yang diusung dari program tersebut, masyarakat dijadikan sebagai modal utama dalam pengelolaan program Kampung KB.

Prinsip dalam program tersebut bertujuan untuk mengaktifkan kembali masyarakat dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk menaikan taraf kehidupannya kearah yang lebih berkualitas melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sangat disayangkan bahwa pada implementasinya, program Kampung KB terutamanya di Kabupaten Bandung Barat belum dapat berjalan secara optimal sehingga manfaatnya belum benar-benar berdampak besar pada masyarakat. Kampung KB yang sudah dicanangkan dominannya masih berada pada tahapan dasar yang berarti program tersebut belum berjalan efektif dan masih jauh dari capaian yang ingin dituju. Sedangkan yang sudah berada pada tahap paripurna atau berkelanjutan hingga saat ini masih sangat sedikit yang bahkan belum mencapai angka minimum yang diharapkan oleh pemerintah.

Kampung KB yang terklasifikasi dalam tahap paripurna merupakan Kampung KB yang programnya telah berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan telah memenuhi capaian yang ingin dituju. Salah satu dari Kampung KB yang sudah paripurna berada di RW 006 Kampung Pamecelan Desa Sukajaya Kecamatan Lembang dengan nama Kampung KB Insan Sejahtera Ramah Anak. Meskipun RW 006 ini merupakan wilayah yang kondisi wilayahnya padat penduduk dan prasejahtera dengan KS-1 lebih tinggi daripada rata-rata Desa. Kampung KB Insan Sejahtera yang sudah dibentuk sejak tahun 2017 nyatanya

telah berhasil mencapai tahap paripurna dan menjadi satu-satunya Kampung KB di Kecamatan Lembang yang telah berhasil mencapai tingkatan itu.

Klasifikasi Kampung KB di tingkat paripurna dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah dari partisipasi masyarakat dalam mengelola program tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Bukan hanya berpartisipasi dalam rangkaian kegiatannya saja, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada empat tahap kegiatan dalam mekanisme pengelolaan Kampung KB, seperti pada tahap persiapan atau perencanaan program, pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun pada tahap persiapan, hingga tahap pengawasan dan evaluasi pada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apabila setiap anggota masyarakat dalam program Kampung KB dapat menerapkan dan mengikuti keseluruhan dari keempat aspek tersebut dengan bertindak untuk saling memahami, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan menyumbangkan tenaga, ide, maupun materil di setiap kegiatan dalam program Kampung KB. Maka tujuan-tujuan dari program tersebut akan tercapai dengan sendirinya, sama halnya dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh Kampung KB Insan Sejahtera.

Partisipasi merupakan bagian dari tindakan sosial dan yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi tersebut salah satunya dapat dilihat dari bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu teori yang akan digunakan oleh peneliti adalah Teori Tindakan Sosial Max Weber. Teori ini akan digunakan sebagai penjelas dari realita yang terjadi atau sebagai pengarah dari pengujian yang akan dilakukan oleh peneliti. Asumsi dasar dari Teori Tindakan Sosial Max Weber ini yaitu mengenai empat macam atau motif tindakan sosial yang diantaranya adalah tindakan rasional instrumental, tindakan rasional yang berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Motif tersebut yang mendasari tindakan rasional atau tindakan yang dilakukan dengan sebuah pertimbangan sadar oleh masyarakat dalam berpartisipasi di suatu program atau kegiatan.

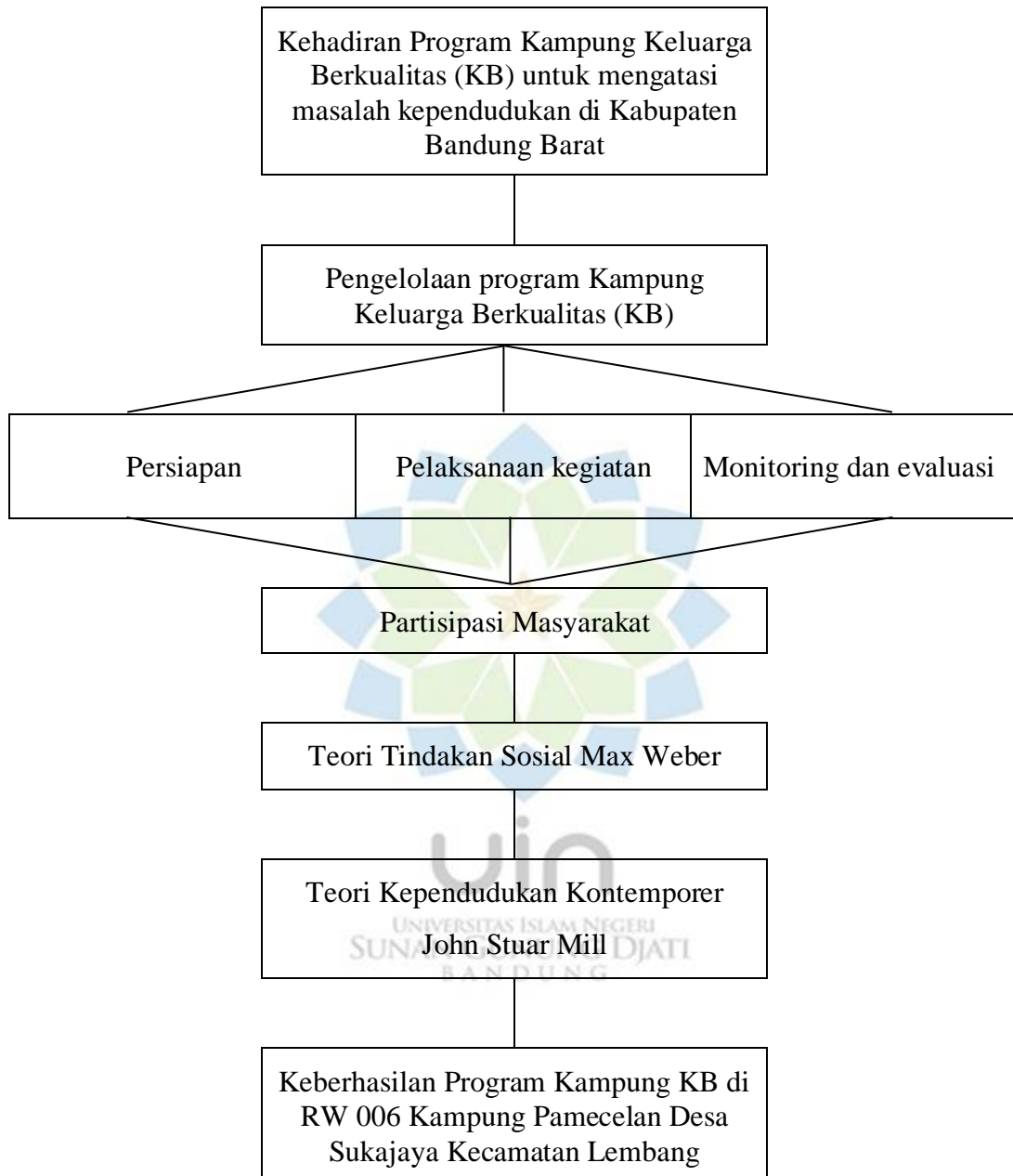
Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat

dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan teori kependudukan kontemporer John Stuart Mill, program Kampung KB ini juga dapat dijelaskan sebagai program pembangunan berbasis kependudukan yang bertujuan mengentas kemiskinan melalui peningkatan kualitas masyarakat sebagai determinan untuk mengatur fertilitas atau angka kelahiran.

Fokus dari penelitian ini adalah keberhasilan Kampung KB Insan Sejahtera yang sudah mencapai tahap paripurna dengan memusatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor utamanya. Partisipasi yang dilakukan oleh warga RW 006 dalam pengelolaan Kampung KB setidaknya memiliki salah satu elemen dari keempat tipe tindakan yang diidentifikasi tersebut. Keberhasilan Kampung KB Insan Sejahtera pun dapat ditinjau dari bagaimana bentuk rasional dari tindakan warganya yang berperan aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan dari program tersebut dan keikutsertaannya mengelola Kampung KB dalam mengikuti setiap tahapan prosesnya sehingga dapat mencapai keberhasilan dari Program KB yang sudah paripurna.



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**



## 1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yaitu kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu ini diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal artikel dan skripsi yang digunakan sebagai referensi juga bahan pertimbangan untuk menulis atau mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Terdapat empat penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Penelitian Malihah (2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Progam Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Cilacap Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam progam Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Cilacap Jawa Tengah dengan didukung oleh teori partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Binangun dalam progam Kampung KB belum sepenuhnya mengikuti keseluruhan dari tahap dari progam tersebut. Dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diketahui bahwa masyarakat tersebut hanya aktif secara keseluruhan saat pelaksanaannya saja. Bentuk partisipasi yang masyarakat Desa Binangun lakukan hanya dalam bentuk pikiran saja. Hal ini dikarenakan faktor usia dan pendapatan sehingga partisipasi masyarakat pun hanya sebagian dari kalangan tertentu saja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: (1) penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Kampung KB. (2) fokus penelitiannya yaitu mengenai partisipasi masyarakat dan (3) Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: (1) lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Cilacap Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Kampung Pamecelan Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Bandung Barat. (2) teori yang

digunakan, peneliti terdahulu menggunakan teori partisipasi sedangkan teori utama dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber.

Penelitian Nopiyanti (2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaannya, dan evaluasi dari program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hanya terlibat pada keputusan yang sedang berlangsung dan keputusan operasional. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programnya pun sudah berkontribusi dengan baik, sedangkan dalam evaluasi partisipasi masyarakat hanya terlibat dalam evaluasi tidak langsung yaitu dengan memberikan penilaian dan saran terhadap program Kampung KB tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu meliputi objek, fokus penelitian dan metode penelitiannya. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitiannya dan pada kerangka pemikirannya. Jika penelitian ini hanya berfokus pada bentuk partisipasinya saja yang meliputi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasinya, pada penelitian kali ini akan dibahas lebih dalam mengenai keselarasannya dengan mekanisme pengelolaan program Kampung KB dan keterkaitannya dengan kajian tindakan sosial.

Penelitian Sari (2022) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Way Sari”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik pengetahuan masyarakat mengenai program Kampung KB dan keterlibatan masyarakat nya dalam program Kampung KB tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kauntitatif deskriptih dengan Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah sasaran Kampung KB



sebagai responden atau objek utamanya. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Kampung KB relatif baik namun tingkat partisipasi masyarakatnya relatif rendah.

Jika dilihat dari persamannya, dapat dilihat bahwa penelitian ini berkaitan juga dengan Program Kampung KB. Perbedaannya yaitu: (1) Lokasi penelitian. (2) Metode penelitian yang digunakan karena peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dan (3) Meskipun keduanya berkaitan dengan program Kampung KB, namun fokus penelitiannya memiliki sedikit perbedaan. Peneliti terdahulu lebih mengkaji tentang partisipasi masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap Program Kampung KB, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada kajian mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dan bentuk tindakan dari keterlibatan masyarakat tersebut dalam mensukseskan program Kampung KB.

Penelitian Ardiansyah (2019) dengan judul “Pelaksanaan Program Kampung KB Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan program Kampung KB sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Dusun Saman dengan menggunakan teori implementasi Charles O. Jones. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung KB di Dusun Saman dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga karena implementasi dari program tersebut berjalan dengan baik. Keberhasilan program ini karena adanya peran penuh dari pemerintah dalam membantu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Sedangkan bentuk dari keberhasilan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya keberfungsian sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan meningkatnya kepesertaan KB.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: (1) penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Kampung KB; (2) metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data

melalui tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi; dan (3) fokus penelitiannya mengenai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: (1) teori yang digunakan. Apabila penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi Charles O. Jones, penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber; (2) apabila peneliti terdahulu lebih mengkaji mengenai pelaksanaan program kampung KB, penelitian yang akan dilakukan lebih mengkaji partisipasi warga dalam pelaksanaan program tersebut; dan (3) lokasi yang digunakan. Apabila penelitian terdahulu berlokasi di Dusun Saman, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kp Pamecelan RW 06, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

